

Ikhtisar Webinar

# **Perubahan Iklim: Adakah Solusi yang Realistis & Efektif?**



## Perubahan Iklim: Adakah Solusi yang Realistis & Efektif?

03 November 2021 | 19.00-21.00 WIB

Webinar 'Perubahan Iklim: Adakah Solusi yang Realistis & Efektif?' dimoderatori oleh Mutti Anggitta dan dibuka oleh Andi Widjajanto. Diskusi ini menghadirkan empat narasumber, yakni (1) Dizar Sabana sebagai Analis Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), (2) Mutti Anggitta sebagai Analis Utama Keamanan dan Perempuan LAB 45, (3) Adhityani Putri sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CeraH, dan (4) Maxensius T. Sambodo sebagai Pakar Ekonomi dan Energi LIPI.

Dizar Sabana membuka paparan tentang latar belakang perubahan iklim. Pada kurun waktu 1850-2019 rata-rata suhu global meningkat lebih dari 1 derajat Celsius. Dengan laju peningkatan suhu global yang meningkat setiap tahunnya, perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dimitigasi, seperti banjir dan badai siklon, hingga berdampak pada sektor pertanian. Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama perubahan iklim. Data menunjukkan emisi gas rumah kaca meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring meningkatnya intensitas aktivitas manusia.

Ditemukan bahwa negara dengan konsumsi energi total terbesar adalah China, AS, dan India, yakni negara-negara dengan populasi terbesar di dunia. Namun, pola yang berbeda ditemukan jika melihat konsumsi energi berdasarkan per kapita. Qatar, Singapura, dan Islandia adalah negara-negara dengan nilai konsumsi terbesar karena tingginya kebutuhan untuk menggunakan pendingin/pemanas ruangan dalam sehari-hari. Penggunaan energi sebenarnya tidak terlalu bermasalah selama menggunakan energi terbarukan. Sementara itu, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi dan tren yang tidak mengalami penurunan dalam kurun waktu empat puluh tahun menjadi salah satu penjelasan mengapa suhu global tetap meningkat.

Untuk menghadapi isu tersebut, banyak negara mencanangkan komitmen *net-zero*. Dua strategi yang dapat dilakukan: mengurangi emisi dan *carbon offset*. Sebagian besar negara masih dalam wacana mengenai penerapan *net-zero*. Meski demikian, beberapa isu mengenai kesepakatan komitmen bersama *net-zero* ini menjadi problematik,

seperti halnya isu deforestasi terhadap negara-negara yang mengandalkan hutan sebagai komoditas.

Lebih lanjut lagi, pernyataan-pernyataan pemimpin negara G20 di COP26 dapat dibandingkan dengan realitas kebijakan di dalam negeri. Telah ditemukan bahwa sebagian besar negara tersebut mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip mitigasi perubahan iklim. Berangkat dari hal tersebut, diskusi dilanjutkan untuk membedah apakah Indonesia sudah *on-track* dalam mitigasi perubahan iklim dan apakah ada solusi yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan Indonesia tanpa mencederai semangat pembangunan ekonomi. Mutti Anggitta memicu diskusi dengan menanyakan kepada kedua narasumber lainnya mengenai seberapa buruk kondisi perubahan iklim sekarang. Apa yang perlu diprioritaskan bagi Indonesia dan bagaimana dengan langkah yang dapat dilakukan oleh individu?

Adhityani Putri menjawab bahwa situasi mengenai perubahan iklim sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Apa yang sering dilihat sebagai bencana alam dengan daya rusak yang besar, sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan alam. Namun, ini adalah hasil dari kerentanan sistem lingkungan manusia yang bertemu dengan peristiwa ekstrem alam. Kerentanan sistem lingkungan tersebut didapat dari proses yang dilakukan sejak Revolusi Industri. Dalam kondisi sekarang ini, sistem lingkungan adalah manifestasi dari krisis iklim dan akan diperparah dengan krisis iklim.

Meskipun infrastruktur energi yang sekarang tetap digunakan untuk dua puluh tahun ke depan, hal yang bisa diprioritaskan dan belum menjadi wacana nasional adalah pembangunan infrastruktur. Dalam perencanaan infrastruktur baru, potensi terdampak oleh perubahan iklim harus masuk dalam pertimbangan. Ini yang diistilahkan sebagai *climate-compatible development*. Sementara itu, peran individu penting karena pada dasarnya semua orang berkaitan, tapi pemerintah tetap menjadi perhatian karena menjadi otoritas yang mengatur barang publik. Jika ada kebijakan publik yang mengatur perilaku masyarakat agar dapat mengurangi emisi karbon, sebagai individu harus mendukung, sehingga ini bukan dikotomi.

Maxensius T. Sambodo menjawab bahwa situasi mengenai perubahan iklim akan sangat nyata dampaknya pada sektor ekonomi yang menggantungkan konsistensi cuaca dan iklim. Apabila dalam menghadapi pandemi ini sudah kewalahan,

bagaimana nantinya dalam menghadapi potensi bencana yang lebih besar jika perubahan iklim tetap dibiarkan?

Sektor kehutanan dan energi harus mendapat perhatian serius. Untuk energi, bisa mengompensasi karbon dari energi tak terbarukan dengan memaksimalkan potensi sumber-sumber energi terbarukan. Selain itu, seharusnya usaha pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim tidak hanya dibebankan pada KLHK, tetapi sudah *mainstreaming* ke semua kementerian jika ingin menanggapi isu tersebut secara serius. Dengan demikian, semua elemen bahkan individu penting untuk berkontribusi. Jika pemerintah tidak bisa diharapkan banyak, sektor swasta pun juga pasti hanya akan memperhitungkan untung-rugi.

Mutti kembali memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber mengenai kebijakan iklim mana di Indonesia yang efektif dan yang tidak efektif. Putri menjawab bahwa beberapa 'langkah bayi' pemerintah dalam menginisiasi kebijakan iklim perlu diapresiasi. Namun, hal itu tidak berarti banyak ketika paradigma pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan. Meskipun sumber daya alternatif untuk membangun energi terbarukan tersedia, tetapi potensi terbesar tetap pada energi tak terbarukan. Potensi ini dimanfaatkan baik untuk konsumsi domestik maupun internasional, yang mana justru akan menghambat perkembangan energi terbarukan. Sementara itu, Maxensius menjawab bahwa harus diakui pemerintah mempunyai perencanaan yang bagus dalam kebijakan iklim, namun tantangannya ada di dalam implementasinya di lapangan. Seharusnya tidak semua kebijakan dibebankan pada pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga bisa mengambil inisiatif. Maxensius juga yakin bahwa kebijakan yang efektif tidak hanya berlaku pada domestik saja, tetapi juga memberikan *multiplier effect* terhadap internasional.

Melanjutkan dari situ, Mutti mengangkat pertanyaan mengenai sumber energi alternatif yang lebih murah dan dapat diandalkan daripada batu bara. Putri menjawab bahwa batu bara lebih murah dan dapat diandalkan adalah mitos karena disubsidi pemerintah. Sebagai komoditas ekspor, batu bara akan lebih terekspos pada kelangkaan apabila perusahaan yang melakukan pertambangan memilih untuk dijual ke pasar internasional alih-alih memenuhi kebutuhan domestik di saat harganya tinggi. Putri menyarankan adanya keamanan energi dengan mendiversifikasi sumber energi nasional karena 80% sumber energi bergantung pada batu bara. Indonesia

memiliki cadangan geotermal terbesar keempat di dunia, membuat potensi untuk diversifikasi sumber energi menjadi terbuka. Menanggapi diversifikasi energi, Maxensius menyarankan adanya investasi dalam *smart grid* untuk mengatasi konsistensi dari performa energi terbarukan. Dengan dibukanya investasi energi terbarukan, akan memberikan ruang kompetisi yang lebih sehat. Namun, adanya pertimbangan ekonomi politik mungkin menghalangi hal tersebut. Selain itu, dalam pengembangan energi terbarukan lebih mengutamakan untuk memanfaatkan potensi Indonesia daripada mengikuti tren global, sehingga meningkatkan independensi.

Pada sesi selanjutnya, Mutti menyampaikan pertanyaan dari kolom komentar terkait donor yang lebih banyak tertarik di kehutanan daripada kelautan dan perikanan. Kontribusi emisi karbon Indonesia memang paling banyak dari deforestasi, sehingga dibutuhkan intervensi di sana. Namun, sekarang sudah mulai bergeser ke kelautan dan perikanan agar tidak terjadi potensi permasalahan pangan.

Kemudian, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana menanggapi wacana sanksi terhadap kendaraan tidak lulus emisi yang dimiliki masyarakat ekonomi rendah. Belum ada aksi afirmatif dan tidak bisa menyalahkan masyarakat yang tidak ada pilihan mode transportasi. Konektivitas dari sistem transportasi publik di Indonesia juga buruk, membuat masyarakat memilih kendaraan individu. Namun, kebijakan publik harus didesain sebagaimana implikasi dari kebijakan publik tersebut juga harus dilindungi oleh kebijakan lainnya. Begitu pula kebijakan transisi *coal-phase out*, PLN harus dicarikan solusi agar tidak menjadi *stranded asset* setelah tidak bergantung pada batu bara. Sehingga semangat transisi yang dihendaki adalah transisi yang berkeadilan.

Terakhir, terdapat pertanyaan mengenai Indonesia sebagai 10 besar penghasil emisi karbon tetapi menunggu negara maju untuk meningkatkan komitmennya, apakah dikarenakan pertimbangan politik atau ada tantangan di penguasaan teknologi. Meskipun ada tantangan dalam penguasaan teknologi, tetapi perspektifnya dapat dimulai dari beban sejarah bahwa negara maju yang memulai emisi karbon sejak Revolusi Industri. Di sisi lain, perhitungan emisi karbon bisa jadi tidak adil dikarenakan negara maju hanya memindahkan tempat produksinya di negara berkembang. Namun, yang keliru bagi posisi Indonesia adalah ketika Indonesia meminta komitmen negara maju untuk memenuhi janji bebas emisinya, Indonesia

juga melakukan eksploitasi dengan melakukan apa yang negara kolonial lakukan pada masa Revolusi Industri.



Jl. Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Rabu, 03 November  
2021

➔ +62 812 8218 4545

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id